Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 4



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Heru: Kita Proses Sesuai Aturan Hukum

JAKARTA (Poskota) -Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mentolerir terhadap tujuh oknum yang melakukan

pencurian aset di Klaster C Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

"Semua yang terlibat kita lakukan proses secara mekanisme dan aturan hukum yang ada," kata Heru kepada wartawan, Minggu (23/6).

Diketahui, pihak pengelola Rusunawa Marunda telah memecat tujuh pegawai non ASN yang melakukan pencurian aset di Klaster C Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menyebut pemecatan tujuh pegawai dilakukan sejak Desember 2023. "Pihak pengelola rusun Marunda per Desember 2023 sudah memberhentikan 7 pegawai non ASN," kata dia melalui pesan singkat, Jumat 21 Juni 2024.

Afan menegaskan pihaknya telah memerintahkan pengelola Rusunawa Marunda agar terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Saya sudah memerintahkan pengelola rusun untuk segera berlapor kembali dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," tegasnya.

Paska insiden pencurian aset ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghapus gedung Klastet C Rusunawa Marunda yang terbengkalai itu.

"Terhadap gedung tersebut akan dilakukan proses penghapusan," ucap Afan.

Afan menegaskan

bahwa gedung di Klaster C Rusunawa Marunda, Cilincing ini telah lama kosong. Penghuni yang sebelumnya tinggal telah pindah ke Rusun Nagrak.

Pengosongan gedung Klaster C Rusunawa Marunda ini berdasarkan rekomendasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut kondisi gedung membahayakan.

Afan menegaskan, terkait kasus pencurian aset di Klaster C Rusunawa Marunda, pengelola sudah berupaya melakukan antisipasi pengamanan aset. Hanya saja upaya tersebut tidak maksimal.

"Mengingat luasnya area kompleks Rusun Marunda dan terbatasnya jumlah pegawai, maka terjadi adanya kekurangan-kekurangan," ucapnya. (Pandi/yh)